

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- A. Siti Soetami, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Refika Aditama, 1994, Bandung
- A'an efendi, *Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan di Peradilan Tata Usaha Negara*, Sinar Grafika, 2016, Surabaya.
- Achmad Ali dan Wiwie, *Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata*, Kencana Prenada Media group, 2012, Jakarta.
- Benjamin Mangkoedilaga, *Lembaga Perdilan Tata Usaha Negara Suatu Orientasi Pengenalan*, Ghalia Indonesia, 1983, Jakarta.
- Badriyah Khaleed, *Mekanisme Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Panduan Praktis Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara*, Pustaka Yustisia, 2016, Yogyakarta.
- Budi Suhariyanto dan Dani Elpah, *Penyalahgunaan Wewenang*, Balitbang Diklat Kumdil M.A.R.I, 2015, Megamendung.
- Dani Elpah, *Titik Singgung Kewenangan antara Peradilan Tata Usaha Negara dengan Peradilan Umum dalam Sengketa Pertanahan*, Litbang M.A.R.I, 2014, Jakarta.
- E.Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Pustaka Tinta Mas, 1994, surabaya.
- G.H.S. Lumbang Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, 1983, Jakarta.

Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, 2011, Bandung.

-----, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, 2013, Bandung.

-----, *Majelis Pengawas Notaris*, Refika Aditama, 2011, Bandung

-----, *Kompilasi Peraturan Perundang-Undangan Jabatan Notaris*, Pustaka Zaman, 2011, Semarang.

Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, Dunia Cerdas, 2013, Jakarta./

Indroharto, *Buku I Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, 2000, Jakarta.

-----, *Buku II Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, 2003, Jakarta.

-----, *Bunga Rampai Tulisan Hukum Buku II Perbuatan Pemerintah Menurut Hukum Publik dan Hukum Perdata*, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Hukum administrasi Negara, 1999, Bogor-Jakarta.

Henny Tanuwidjaja, *Pranata Hukum Jaminan Utang dan Sejarah Lembaga Hukum Notariat*, Refika Aditama, 2012, Bandung.

Herlin Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bhakti, 2013, Bandung.

Hernol Ferry Makawimbang, *Perbuatan Merugikan Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang*, Thafa Media, 2015, Yogyakarta.

Jonathan Crowe, *Legal Theory*, The University Of Queensland, 2009, Australia.

Muchsin, *Ikhtisar Ilmu Hukum*, Badan Penerbit Iblam, 2006, Jakarta.

Muchsan dan Nurhasan Ismail dan Riawan Tjandra, *Peradilan Tata Usaha Negara Mendorong Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Berwibawa*, Universitas Atmajaya, 2009, Yogyakarta.

Muhammad Hafidh dan Habib Adjie dan Zul Fadli, *Himpunan Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Undang-Undang Jabatan Notaris*, Duta Nusindo, 2016, Semarang.

N.M.Spelt dan J.B.J.M Ten Berge, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yudika, 1993, Surabaya.

Nomensen Sinamo, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jala Permata Aksara, 2015, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kharisma Putra Utama, 2016, Jakarta.

Philipus M.Hadjon dan Tatiek Sri djatmiati, *Argumentasi Hukum*, 2016, Jakarta
-----, *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*, Gajahmada University, 2011, Yogyakarta.

-----, *Pengantar Hukum administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, 1993, Yogyakarta.

- , *Hukum Administrasi dan Good Governance*,
Universitas Tri Sakti, 2010, Jakarta.
- Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, 1996,
Jakarta.
- Priyatmanto Abdoellah, *Revitalisasi Kewenangan PTUN Gagasan Perluasan
Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara*, Cahaya Atma Pustaka,
2016, Yogyakarta
- R.Wiyono, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Sinar Grafika, 2015,
Jakarta.
- R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia-Suatu Penjelasan*,
Rajawali, 1982, Jakarta.
- Ridwan HR, *Hukum administrasi Negara*, Raja gravindo, 2006, Jakarta
- Sjaifurrahman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*,
Mandar Maju, 2011, Bandung.
- Soemaryono dan Anna Erliyana, *Tuntunan Praktik Beracara di Peradilan Tata
Usaha Negara*, Primamedia Pustaka, 1999, Jakarta.
- Soejono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*,
Rajawali Press, 1985, Jakarta.
- T.Boestami, *Hukum Perdata dan Hukum Tata Usaha Negara Dalam Teori dan
Praktek*, Alumni Bandung, 1994, Bandung.
- Tri Cahya Indra Permana, *Rekonstruksi Penanganan Sengketa Kepegawaian
pada Peradilan Tata Usaha Negara*, Varia Peradilan, Januari
2017, Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut*

Hukum Perdata, Mandar maju, 2000, Bandung.

Yuliandri, *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang*

Baik, RajaGrafindo Perkasa, 2009, Jakarta.

Z.A. Sangaji, *Kompetensi Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha*

Negara dalam Gugatan Pembatalan Sertifikat Tanah, Citra aditya

Bahkti, 2003, Bandung

Zairin Harahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara edisi revisi*,

Rajagrafindo Persada, 2015, Jakarta.

B. Jurnal / Makalah

Tri Cahya Indra Permana, *Rekonstruksi Penanganan Sengketa Kepegawaian*

pada Peradilan Tata Usaha Negara, Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun

XXXII Nomor 374 Januari 2017, Jakarta.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

- Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor: M.02.PR.08.10 tahun 2004 tentang Tata cara pengangkatan anggota, pemberhentian anggota, susunan organisasi, tata kerja, dan tata cara pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor 40 tahun 2015 tentang susunan organisasi, tata cara pengangkatan anggota, pemberhentian anggota, dan tata kerja majelis pengawas.
- Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 1991 tentang petunjuk pelaksanaan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986.
- Kode Etik Notaris.
- Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara.

D. Internet

www.ptunjakarta.go.id

E.Putusan

Putusan Nomor 25/G/2009/PTUN.SBY Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya.